

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada (Rustiadi et al., 2011:119). Dalam penelitian ini, pembangunan wilayah yang dimaksud yaitu pembangunan wilayah perbatasan untuk menghasilkan manfaat kesejahteraan dan keamanan di perbatasan.

Perencanaan pengembangan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mampu menentukan prioritas pembangunan dengan mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi. Tujuan pembangunan akan tercapai bila perencanaan pembangunan memperhatikan aspek keterkaitan antar sektor dan antar wilayah (Taena, 2009:38). Menurut Rustiadi et al., (2011:28-32), keragaman dan perbedaan karakteristik sumberdaya dan cara-cara manusia memanfaatkan sumberdaya dapat dijelaskan dan disederhanakan dengan pengklasifikasian spasial. Berikut merupakan tabel hubungan antara berbagai konsep ruang/wilayah dengan tujuan/manfaat penggunaannya dapat dijelaskan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Hubungan antara Berbagai Konsep Ruang Wilayah dengan Tujuan/Manfaat Penggunaannya

NO	RUANG/ WILAYAH	TUJUAN DAN MANFAAT PENGUNAAN	CONTOH
1	Wilayah Homogen	1. Penyederhanaan dan pendeskripsian ruang/wilayah 2. Perwilayahan pengelolaan (zonasi kawasan fungsional)	1. Pola penggunaan/penutupan lahan 2. Perwilayahan komoditas
2	Wilayah Nodal	1. Deskripsi hubungan nodalitas 2. Identifikasi daerah pelayanan/pengaruh 3. Penyusunan hirarki pelayanan/fasilitas	1. Keterkaitan CBD dan daerah pelayanannya 2. <i>Growth pole area</i> 3. <i>Central place and periphery</i> 4. Sistem/ordo kota/pusat pelayanan
3	Wilayah Sistem Ekologi	1. Pengelolaan sumberdaya wilayah berkelanjutan 2. Identifikasi <i>carring capacity</i> kawasan 3. Siklus alam aliran sumberdaya, biomasa energi, limbah dll	1. Pengelolaan DAS 2. Cagar alam 3. Ekosistem mangrove
4	Wilayah Sistem Ekonomi	1. Percepatan pertumbuhan wilayah 2. Produktifitas dan mobilisasi sumberdaya	1. Wilayah pembangunan 2. Kawasan andalan 3. KAPET

NO	RUANG/ WILAYAH	TUJUAN DAN MANFAAT PENGUNAAN	CONTOH
		3. Efisiensi	4. Kawasan agropolitan 5. Kawasan cepat tumbuh (pertumbuhan)
5	Wilayah Sistem Sosial	1. Perwilayahan menurut sistem budaya, etnik, bangsa dll 2. Identifikasi komunitas dan <i>society</i>	1. Kawasan adat 2. Perlindungan/pelestarian (cagar) budaya 3. Pengelolaan kawasan publik kota (menghindari tawuran)
6	Wilayah Politik	1. Menjaga keutuhan/integrasi wilayah teritorial 2. Menjaga pengaruh/kekuasaan teritorial 3. Menjaga pemerataan (<i>equity</i>) antar sub wilayah	1. Negara 2. Provinsi 3. Kabupaten 4. Desa
7	Wilayah Administrasi	Optimalisasi fungsi-fungsi administrasi dan pelayanan publik pemerintahan	1. Negara 2. Provinsi 3. Kabupaten 4. Kecamatan

Sumber : Rustiadi et al.,2011

Dalam paradigma perencanaan wilayah yang modern, wilayah diartikan sebagai bentuk pengkajian yang sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan pemanfaatan sumberdaya yang terbaik untuk meningkatkan produktifitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Rustiadi et al.,2011). Wilayah perbatasan RI-PNG Distrik Muara Tami Kota Jayapura dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai wilayah sistem ekonomi yang bertujuan untuk percepatan pertumbuhan wilayah dan penerapan contoh yang digunakan yaitu agropolitan.

2.2 Perbatasan

2.2.1 Pengertian Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dari sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial dan budaya (Nugroho dan Rokhmin,2012:351). Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Empat fungsi kawasan perbatasan menurut Van Well (2006:2) yaitu:

1. *Barriers*/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi;
2. Jembatan, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas;
3. Batas sumber daya (*resources*) yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah;
4. Simbol identitas, lambang identitas suatu wilayah/bangsa/negara.

2.2.2 Karakteristik Kawasan Perbatasan

Menurut Soegijoko (1997:154), ada tiga aspek yang mendasari karakteristik daerah perbatasan yaitu sosial-ekonomi, pertahanan-keamanan dan politik. Karakteristik kawasan perbatasan menurut Departemen Pekerjaan Umum (2005:2) dibagi kedalam tujuh bagian yaitu karakteristik fisik, karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, karakteristik penduduk, karakteristik ekonomi, karakteristik sumberdaya alam, karakteristik pertahanan dan karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang yang dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Karakteristik dan Indikator Kawasan Perbatasan

NO	JENIS KARAKTERISTIK	INDIKATOR
1	Karakteristik Fisik	a. Garis batas di darat dan laut belum jelas dan pasti. b. Pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat. c. Garis batas di laur ditentukan dengan keberadaan pulau-pulau terluar yang terpencil. d. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman. dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi.
2	Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat	a. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas. b. Jumlah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) masih terbatas dan fungsi CIQS belum optimal.
3	Karakteristik Penduduk	a. Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. b. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. c. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah akibat tingginya angka kematian. d. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar masuk cukup tinggi. e. Secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudaranya di negara tetangga.
4	Karakteristik Ekonomi	a. Tingginya perbedaan harga jual produk-produk lokal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs negara tetangga. b. Keberadaan produk-produk yang berasal dari sumberdaya alam belum memiliki nilai tambah karena merupakan produk mentah. c. Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah miskin dan umumnya mata pencaharian adalah petani dan nelayan tradisional.

NO	JENIS KARAKTERISTIK	INDIKATOR
5	Karakteristik Sumberdaya Alam	d. Transaksi perdagangan dilakukan secara tradisional. Hasil usaha yang diperoleh sebagian besar dikonsumsi sendiri. a. Potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan/pertanian, perikanan dan sumberdaya air (daerah tangkapan air). b. Pengelolaan sumberdaya alam relatif terkendali terutama eksploitasi hutan dan kawasan lindung yang ilegal dan penangkapan ikan ilegal.
6	Karakteristik Pertahanan	a. Rawan persembunyian kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) penyelundupan dan tindak kriminal. Penduduk mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh informasi dari luar. b. Rawan terhadap ancaman langsung dari luar dan pengaruhnya. c. Lemahnya sistem pengawasan/pengamanan dikarenakan pos-pos pengawasan TNI maupun PLB terbatas dan tidak memadai.
7	Karakteristik Fungsi dan Pemanfaatan Ruang	a. Sebagian besar ruang kawasan perbatasan adalah kawasan lindung yang rawan terhadap eksploitasi, terutama <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>. b. Taman-taman nasional yang merupakan bagian dari kawasan lindung memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. c. Tempat perlindungan satwa dan flora endemik. Tempat kawasan budidaya seperti kelapa sawit dan karet serta perikanan tangkap di kawasan perbatasan.

Sumber :Departemen Pekerjaan Umum,2005

2.2.3 Tipologi Perbatasan

Menurut Wu (2001:21) penetapan tipologi kawasan perbatasan didasarkan pada karakteristik wilayah dan peluang nilai tambah yang dihasilkan. Terdapat empat tipologi wilayah perbatasan yaitu (Departemen Pekerjaan Umum,2005:3) :

1. Wilayah perbatasan yang tidak berpenghuni, seperti di pulau-pulau terluar.
2. Wilayah perbatasan yang berpenghuni dan memiliki akses keluar yang resmi atau formal, yang ditandai oleh keberadaan Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB). PPLB yang dimaksud adalah pos pemeriksa dengan fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS).
3. Wilayah perbatasan yang berpenghuni tetapi hanya memiliki akses keluar tidak resmi, yaitu berupa Pos Lintas Batas (PLB) tanpa keberadaan CIQS.
4. Wilayah perbatasan yang berpenghuni tetapi tidak memiliki pos sebagai simpul untuk akses keluar (cenderung berorientasi ke dalam/ibukota kabupaten). Akses keluar dilakukan melalui pos lintas batas di kabupaten/kota atau Provinsi lain.

Tipologi perbatasan Distrik Muara Tami Kota Jayapura termasuk kedalam tipologi kedua yaitu wilayah perbatasan yang berpenghuni dan memiliki akses formal berupa PPLB Skow.

2.2.4 Hubungan di Kawasan Perbatasan

Menurut Akaha dan Vassilieva (2005:3) meningkatnya pergerakan manusia di kawasan perbatasan menyebabkan implikasi di berbagai bidang antara lain :

1. Mengubah sifat hubungan internasional yang terbentuk (terjadinya pergerakan manusia di kawasan perbatasan/mobilitas penduduk dapat mendorong pembangunan regional diantara negara yang relatif lebih maju dan membentuk peluang kerjasama).
2. Adanya kecenderungan pemerintah lokal tidak mampu membentuk kerjasama internasional dalam menangani permasalahannya, sehingga potensi konflik cenderung terjadi akibat perbedaan perspektif.

Kedua kemungkinan tersebut dapat terjadi seiring dengan kebijakan yang melandasi hubungan kedua wilayah tersebut. Perubahan kondisi hubungan di perbatasan ke arah kerjasama akan cenderung meningkatkan potensi pergerakan dengan motif kesempatan ekonomi (perusahaan maupun individual) karena tingginya potensi pasar dalam mengakomodasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki kedua wilayah (Akaha dan Vassilieva,2005:1)

Menurut Husnadi (2006:204), terdapat empat kategori hubungan penduduk yang tinggal di perbatasan antara lain :

1. Hubungan antar penduduk kedua negara tidak seimbang, yaitu penduduk dari negara secara ekonomi relatif tertinggal cenderung berorientasi ke negara tetangganya yang lebih maju.
2. Hubungan antar penduduk kedua negara tidak seimbang, tetapi polanya berkebalikan, yaitu penduduk dari negara yang secara ekonomi lebih maju justru cenderung berorientasi ke negara tetangganya yang lebih terbelakang.
3. Terjadi kontrol perbatasan yang sangat ketat sehingga hubungan antar penduduk kedua negara hampir tidak terjadi.
4. Hubungan ekonomi antar penduduk kedua negara berkembang ke arah integrasi.

Menurut Martinez (dalam Madu et al., 2010:62-95) terdapat empat model interaksi perbatasan yang mencerminkan bagaimana keamanan wilayah perbatasan dikelola. Keempat model tersebut dapat menjelaskan tingkat kematangan hubungan kedua negara. Semakin matang hubungan, semakin terbuka wilayah perbatasan. Tingkat kematangan hubungan dapat diukur dari jaminan tingkat keamanan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Empat model interaksi perbatasan yaitu :

1. *Alienated borderland* adalah suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnis.
2. *Co existent borderland* adalah suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas dapat ditekan ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang belum terselesaikan misalnya masalah yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya yang strategis di wilayah perbatasan.
3. *Interdependent borderland* adalah suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat di dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
4. *Integrated borderland* adalah suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan.

Interaksi antar negara RI-PNG termasuk kedalam model interaksi kedua yaitu *co existent borderland* yang mencerminkan konflik lintas batas masih dapat dikendalikan.

2.3 Kebijakan Pengembangan Perbatasan

Perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan di tingkat regional dan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sianturi, 2011:7).

2.3.1 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kawasan perbatasan meliputi 10 kawasan perbatasan dengan negara tetangga, termasuk

92 pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi penempatan titik dasar yang berperan penting dalam penentuan garis batas negara.

2.3.2 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

Arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Kebijakan umum pengembangan kawasan perbatasan antarnegara terdiri dari tujuh kebijakan, yaitu :

1. Menata batas kontinen dan maritim perbatasan antarnegara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberi perhatian lebih besar kepada kawasan perbatasan sebagai “halaman depan” negara dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia dan Pasifik.
3. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi.
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan / distrik-distrik yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
5. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

2.3.3 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, pengaturan wilayah negara khususnya untuk wilayah perbatasan bertujuan untuk :

1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.

2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

2.3.4 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

RPJMN Tahun 2010-2014 memuat prioritas-prioritas pengembangan wilayah Papua tahun 2012, salah satunya yaitu prioritas daerah tertinggal dan terdepan di Muara Tami Kota Jayapura. Arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal dan terdepan yaitu pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan stabilitas keamanan serta ketertiban wilayah perbatasan, serta peningkatan pengamanan wilayah perbatasan darat Papua-Papua New Guinea. Strategi pengembangan daerah tertinggal dan terdepan yaitu :

1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan pengembangan ekonomi lokal.
3. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
4. Menambah jumlah pos-pos perbatasan.

2.3.5 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

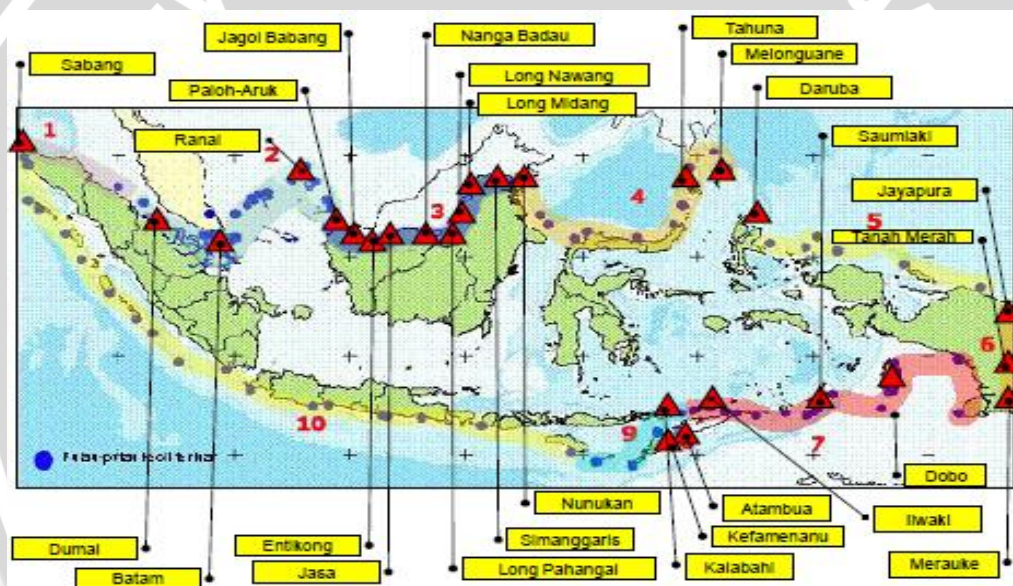
Penataan ruang wilayah nasional termasuk wilayah kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan :

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah.
8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor.

9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditetapkan dengan kriteria:

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga.
2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.



Gambar 2.1 Lokasi Sebaran Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan

Sumber : PP Nomor 26 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ditetapkan sebanyak 26 PKSN (Sabang, Dumai, Batam, Ranai, Paloh-Aruk, Jagoibabang, Entikong, Jasa, Nanga Badau, Long Pahangai, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris, Nunukan, Kalabahi, Kefamenanu, Atambua, Tahuna, Melonguan, Daruba, Jayapura, Tanah Merah, Merauke, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki) untuk mendorong pertumbuhan di kawasan perbatasan.

2.3.6 Kawasan Perbatasan dalam Perspektif *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025 (BNPP)

Konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dikembangkan dengan mengacu pada pokok-pokok pikiran :

1. Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan pendekatan secara komprehensif tiga dimensi yaitu kesejahteraan, keamanan dan lingkungan.

- a. Pendekatan kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan atau PKSN yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara. Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional.

- b. Pendekatan keamanan

Di kawasan perbatasan darat, konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk “sabuk komando” perbatasan negara. Sabuk komando perbatasan negara ini berupa *buffer area* atau *security zone* sejauh ± 4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kelerengan tanah, maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos pengawasan di sepanjang sabuk komando yang berfungsi memantau aset-aset sumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan.

- c. Pendekatan lingkungan

Pendekatan lingkungan dioperasionalkan dengan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan antara lain dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat.

2. Basis manajemen penanganan perbatasan difokuskan pada problem dan wilayah pengelolaan kawasan perbatasan dengan menerapkan manajemen berbasis wilayah di kawasan perbatasan, akan dipermudah dengan telah ditetapkannya dari awal mengenai lokasi prioritas. Fokus lokasi penanganan yang

diprioritaskan yakni kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah konsentrasi pengembangan yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:

- Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat.
- Kecamatan lokasi pulau-pulau kecil terluar.
- Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- Kecamatan yang menjadi *exit-entry point* berdasarkan *Border Crossing Agreement*.

Berdasarkan pertimbangan dan pola penetapan lokasi prioritas dengan empat kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 187 lokasi prioritas di 64 wilayah konsentrasi pengembangan. Kota Jayapura merupakan salah satu wilayah konsentrasi pengembangan prioritas I yaitu pada periode 2010-2014 dengan Distrik Muara Tami sebagai lokasi prioritasnya.

2.3.7 Kawasan Perbatasan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Darat Papua-PNG Tahun 2006

Kawasan perbatasan negara pada Provinsi Papua yang berbatasan darat dengan Papua New Guinea meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Dalam RTR Kawasan Perbatasan Darat Papua-PNG, Kota Jayapura masuk dalam salah satu KPE yang telah ditetapkan yaitu KPE Jayapura-Keerom meliputi wilayah administrasi distrik yang berbatasan langsung yaitu Distrik Muara Tami.

Tabel 2.3 Arahkan Kawasan Pengembangan Ekonomi dalam RTR Kawasan Perbatasan Darat Papua-PNG

KPE	SEKTOR UNGGULAN	POLA PEMANFAATAN RUANG	SISTEM PUSAT PERMUKI MAN	RENCANA SISTEM TRANSPORTASI		
				JALAN	TATA KEPELA BUHAN	TATA BANDARA
KPE Jayapura-Keerom	Kehutanan, pertanian, perkebunan	- Kawasan perkebunan (Distrik Muara Tami, Arso, Waris, Senggi). - Kawasan permukiman (Distrik Muara Tami di Kota Jayapura, Distrik Arso, Waris, Senggi,	Kota Jayapura	- Jalan arteri primer meliputi jalan Kota Jayapura-Arso - Jalan kolektor primer: jalan Jayapura-Skow, Arso-Waris-Senggi, Senggi-Batom-Kiwirok-	Pelabuhan laut nasional di Jayapura	Bandara udara sekunder di Jayapura

KPE	SEKTOR UNGGULAN	POLA PEMANFAATAN RUANG	SISTEM PUSAT PERMUKI MAN	RENCANA SISTEM TRANSPORTASI		
				JALAN	TATA KEPELA BUHAN	TATA BANDARA
		Web di Kabupaten Keerom.		Oksibil- Waropko		

Sumber : RTR Kawasan Perbatasan Tahun 2006

2.3.8 Kawasan Perbatasan dalam RTRW Provinsi Papua Tahun 2010-2030

RTRWN menentukan PKSN berada di Jayapura, Tanah Merah dan Merauke, namun perlu ditambahkan dengan Keerom dan Pegunungan Bintang yang juga merupakan kabupaten perbatasan dengan Papua New Guinea. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua, penentuan PKSN perlu dipertegas dengan arahan lokasi yang lebih tepat sesuai kriteria, yakni :

1. Muara Tami di Kota Jayapura.
2. Mendiptana di Kabupaten Boven Digoel.
3. Toray di Kabupaten Merauke.
4. Kibay di Kabupaten Keerom.
5. Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan bagi pengembangan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

2.4 Pengembangan Perbatasan

Membangun wilayah perbatasan berhadapan dengan kompleksitas aspek sosial, ekonomi dan lingkungan setempat. Hal itu menuntut perencanaan yang tepat untuk menghasilkan manfaat kesejahteraan dan keamanan di wilayah setempat maupun sekitarnya (Nugroho dan Rokhim, 2012:351). Hadi (2009:4) menawarkan model pengembangan wilayah perbatasan darat. Setiap model pengembangan memiliki komponen pembentuk masing-masing yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengembangannya. Model-model pengembangan wilayah perbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan perlu dilakukan secara bertahap mulai dari usaha perdagangan dan jasa, pergudangan, industri, sampai kegiatan proses yang menggunakan bahan baku dari kedua negara, sehingga dibutuhkan suatu kawasan berikat dan pelabuhan bebas. Beberapa

komponen yang membentuk model ini terdiri dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), kawasan berikat, kawasan industri, pelabuhan darat, *welcome plaza* dan kawasan permukiman.

2. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun kehutanan. Berkembangnya kawasan agropolitan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dari mulai hulu hingga ke hilir beserta jasa penunjangnya. Komponen-komponen dalam model kawasan agropolitan antara lain desa-desa pertanian serta pusat pelayanan agropolitan.

3. Kawasan Transito

Pengembangan kawasan transito di perbatasan sangat dimungkinkan karena adanya interaksi antara pusat pertumbuhan di kedua negara yang berbatasan, sehingga dapat menciptakan berbagai kegiatan perjalanan antar negara. Kawasan transito dapat difungsikan sebagai ruang pameran produk, etalase daerah untuk memperkenalkan produk-produk unggulannya. Selain itu dapat dibangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas ekonomi kedua wilayah yang membangkitkan perjalanan antar negara.

4. Kawasan Wisata

Pengembangan kawasan perbatasan sebagai objek wisata lingkungan dan budaya perlu didukung oleh berbagai aktivitas riset di kawasan tersebut. Komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam model ini antara lain stasiun riset, kawasan budaya lokal serta kawasan wisata lingkungan, penginapan, telekomunikasi, jasa pemanduan dan didukung adanya fasilitas jalan dan peningkatan pemeriksaan dalam PPLB.

2.5 Agropolitan sebagai Alternatif Pengembangan Perbatasan

2.5.1 Pengertian Agropolitan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan), agropolitan diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Menurut Nugroho dan Rokhim (2012:270), agropolitan merupakan konsep dan metodologi pembangunan yang terencana dan terintegrasi pada suatu wilayah tertentu yang berlandaskan kepada sektor pertanian dalam pengertian *on-farm* dan *off-farm* dan segala penunjangnya dengan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan, memperbaiki dan memelihara kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, serta meningkatkan fungsi dan efektifitas kelembagaan pemerintah maupun sosial di dalam wilayah.

2.5.2 Kriteria Agropolitan

Menurut Rustiadi (2009:9) terdapat beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan karakteristik wilayah pengembangan kawasan agropolitan yaitu :

1. Memiliki daya dukung dan potensi fisik wilayah yang memadai sebagai kawasan pertanian.
2. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan.
3. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang cukup memadai untuk tercapainya *economic of scale* dan *economic of scope* (kawasan mempunyai radius pelayanan 3-10 km, jumlah penduduk 50 hingga 150 ribu jiwa atau kepadatan minimal 200 jiwa per km², mencakup beberapa desa hingga gabungan sebagian 1-3 kecamatan).
4. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman yang memadai, tersedianya prasarana dan sarana produksi yang mendukung pengembangan komoditas/produk unggulan seperti jalan, pasar, irigasi, terminal, listrik dan sebagainya.
5. Adanya satu atau beberapa pusat kegiatan/pelayanan yang terintegrasi atau adanya sistem manajemen dengan otonomi yang cukup, berkembangnya aktivitas sektor-sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (jasa dan finansial).

2.5.3 Persyaratan Agropolitan

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan), suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan), serta berpotensi atau lebih berkembang diversifikasi usaha dari komoditi unggulannya. Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian (*on farm*) tetapi juga kegiatan *off farm*. Agribisnis merupakan suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai subsistem agribisnis hilir dan didukung oleh subsistem penunjang yang mencakup :
 - a. Subsistem agribisnis hulu mencakup mesin, peralatan pertanian, pupuk dan lain-lain.
 - b. Subsistem usaha tani/pertanian primer mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
 - c. Subsistem agribisnis hilir meliputi industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
 - d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infraskuktur dan kebijakan pemerintah.
2. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti :
 - a. Pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan.
 - b. Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal dan kegiatan agribisnis.
 - c. Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.

- d. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis yakni sebagai sumber informasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis.
 - e. Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan.
 - f. Sarana sosial, jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya, irigasi, transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
 4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

2.5.4 Identifikasi Komoditas Unggulan

Pengembangan perekonomian dipengaruhi oleh komoditas unggulan yang terdapat di wilayah tersebut. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan komoditas tergolong unggul atau tidak dalam suatu wilayah. Kriteria-kriteria tersebut adalah (Alkadri et al.,2001 dalam Daryanto,2003:59) : (1) harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian, (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang kuat baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya, (3) mampu bersaing dengan produk komoditas sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam hal harga produk, biaya produk, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan, (4) memiliki keterkaitan dengan wilayah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku, (5) memiliki status teknologi yang terus meningkat, (6) mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya, (7) dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, (8) tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal, (9) pengembangannya harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan dan (10) pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, kriteria yang akan digunakan sebagai instrumen penentuan komoditas unggulan pada penelitian ini yaitu adanya dukungan pemerintah, harga jual, ketahanan produk dan keterhubungan sektor lain.

2.6 Konsep Pengembangan Agropolitan

Menurut Rustiadi dan Pranoto (2007), penerapan konsep agropolitan untuk membangun ekonomi perdesaan harus didahului dengan mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Identifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah. Identifikasi potensi sumberdaya yang dimaksud yaitu potensi fisik lingkungan, jumlah petani dan potensi komoditas unggulan sebagai basis agribisnis.
2. Kemudahan transportasi sehingga hubungan (interaksi) dengan luar dapat berjalan dengan baik.
3. Memfungsikan wilayah sebagai pusat perdagangan maupun transit bagi pihak-pihak yang melakukan perdagangan.

Menurut Nugroho dan Rokhmin (2012:270), pembangunan agropolitan berhadapan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

1. Aspek sosial

Kelembagaan merupakan landasan bagi berbagai fungsi layanan, akses dan aliran manfaat untuk mendukung pembangunan agropolitan. Rusastra et al. (2004) dalam Nugroho dan Rokhmin (2012:272) menyatakan keberhasilan pengembangan agropolitan memerlukan dukungan penguatan kelembagaan, terutama aspek pertanahan, permodalan untuk petani, diversifikasi komoditi pertanian dan konservasi lingkungan. Faktor lain dalam aspek sosial adalah sumberdaya manusia dan pengelolaan informasi.

2. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi agropolitan meliputi infrastruktur, sektor produksi dan permintaan. Infrastruktur pendukung mencakup transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, energi dan air bersih. Sektor produksi mencakup keseluruhan sistem agribisnis yakni *on-farm*, *off-farm* hulu dan hilir dan sektor penunjangnya. Permintaan terdiri dari aliran barang, jasa dan modal keluar wilayah atau ekspor dan ke dalam atau impor.

3. Aspek lingkungan

Aspek lingkungan dicirikan oleh keberadaan kawasan lindung, budidaya dan khusus. Aspek ruang menempati posisi penting dalam pembangunan agropolitan. Penataan struktur ruang wilayah agropolitan diarahkan untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan

jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata. Penataan pola ruang diarahkan untuk memelihara kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis.

Menurut Soenarno (2003:3), konsep pengembangan agropolitan terkandung muatan :

1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, pasar konsumen produk non pertanian, pusat industri pertanian, penyedia pekerjaan non pertanian, pusat agropolitan dan *hinterlandnya* terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi dan kabupaten/kota.
2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian, intensifikasi pertanian, pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian, produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian.
3. Penetapan sektor unggulan yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal), mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4. Dukungan sistem infrastruktur membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
5. Dukungan sistem kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat dan pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam pengembangan perbatasan RI-PNG Distrik Muara Tami Kota Jayapura melalui konsep agropolitan dapat dilihat pada Tabel 2.4 halaman 26. Hal-hal yang diadopsi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sulistyono, Pandu Z. 2006. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Malang:UB

Hal-hal yang diadopsi dari penelitian diatas yaitu variabel dan metode analisis. Variabel yang digunakan untuk bahan masukan variabel peneliti yaitu variabel kebijakan. Metode analisis yang digunakan untuk bahan masukan metode analisis peneliti yaitu LQ dan *Growth Share*.

2. Brahmento. 2013. Arahana dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan Pendekatan Agropolitan di Kabupaten Blitar. Disertasi. Bogor:IPB

Hal-hal yang diadopsi dari penelitian diatas yaitu variabel dan metode analisis. Variabel yang digunakan untuk bahan masukan variabel peneliti yaitu variabel fasilitas. Metode analisis yang digunakan untuk bahan masukan metode analisis peneliti yaitu integrasi AHP dan SWOT (A'WOT).

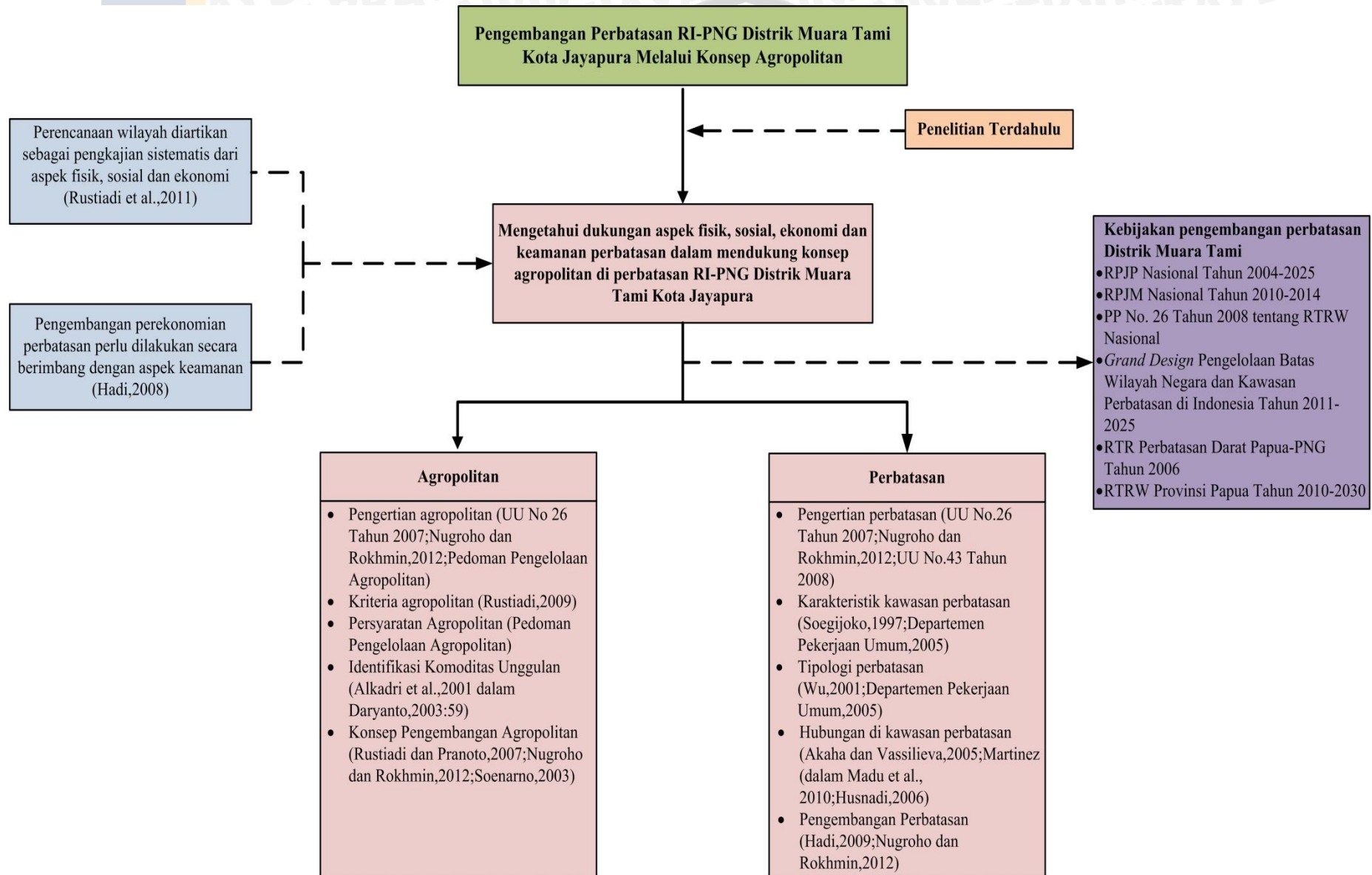
3. Farizi,Hafiz. 2012. Arahana Pengembangan Agropolitan Berbasis Komoditas Hortikultura di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Skripsi. Malang:UB

Hal-hal yang diadopsi dari penelitian diatas yaitu variabel dan metode analisis. Variabel yang digunakan untuk bahan masukan variabel peneliti yaitu variabel kelembagaan. Metode analisis yang digunakan untuk bahan masukan metode analisis peneliti yaitu analisis kemampuan lahan, analisis kelembagaan dan analisis *linkage* sistem.

Tabel 2.4 Studi Terdahulu

SUMBER / JUDUL	TUJUAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE ANALISIS	PERBEDAAN
Sulistyo,Pandu Z. 2006. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan di Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Malang:UB	• Mengidentifikasi karakteristik fisik, sosial-budaya dan ekonomi kawasan perdesaan Kecamatan Tutar • Mengetahui kesesuaian konsep agropolitan terkait dengan karakteristik fisik sosial budaya dan ekonomi kawasan perdesaan di Kecamatan Tutar • Menyusun arahan pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Tutar	• Tingkat kekotaan • Kesesuaian agroklimat • Kependudukan • Interaksi sosial kawasan perdesaan • Hubungan sosial budaya masyarakat • Ketenagakerjaan • Perekonomian perdesaan • Kebijakan	• Metode superimpose dan USLE • LQ • Growth Share • proyeksi penduduk • Analisis kegiatan agribisnis • SWOT	• Lokasi peneliti terdahulu pada kawasan perdesaan tetapi bukan kawasan perbatasan antar negara sehingga terdapat perbedaan variabel yang diteliti • Peneliti terdahulu melakukan proyeksi penduduk dan hanya menggunakan metode SWOT untuk menyusun arahan pengembangan kawasan agropolitan
Brahmento. 2013. Arahana dan Strategi Pengembangan Kawasan	• Mengidentifikasi tipologi Kecamatan di Kabupaten Blitar	• Lahan komoditas • Penduduk • Jarak • Fasilitas	• Analisis Cluster • Analisis LQ • Analisis Shift Share	• Lokasi peneliti terdahulu bukan pada kawasan perbatasan sehingga terdapat perbedaan

SUMBER / JUDUL	TUJUAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE ANALISIS	PERBEDAAN
Perdesaan dengan Pendekatan Agropolitan di Kabupaten Blitar. Disertasi. Bogor:IPB	• Menganalisis komoditas pertanian utama • Menentukan pusat pembangunan daerah • Merumuskan arah dan strategi pembangunan daerah	• Karakteristik wilayah	• Analisis Skalogram • Analisis integrasi AHP dan SWOT (A'WOT)	- variabel yang diteliti • Peneliti terdahulu menggunakan analisis cluster untuk mengetahui tipologi masing-masing kecamatan
Hafiz,Farizi .2012 Arahan Pengembangan Agropolitan Berbasis Komoditas Hortikultura di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur	• Mengidentifikasi karakteristik fisik dasar dan non fisik Kecamatan Sembalun terkait dengan potensi yang mendukung pengembangan agropolitan • Menganalisis potensi dan masalah pertanian di Kecamatan Sembalun • Menetapkan arahan rencana pengembangan kawasan agropolitan Kecamatan Sembalun	• Fisik dasar • Sarana dan prasarana pendukung pertanian • Kelembagaan • Ekonomi • Agro input • Struktur tata ruang	• Analisis potensi ekonomi (LQ dan Growth Share) • analisis kelembagaan • analisis kemampuan lahan • analisis kesesuaian lahan • analisis subsistem agropolitan • analisis <i>linkage</i> sistem • analisis kajian pengembangan berdasarkan pedoman • analisis struktur ruang • analisis AHP • analisis SWOT • analisis IFAS EFAS	• Lokasi peneliti terdahulu bukan pada kawasan perbatasan sehingga terdapat perbedaan variabel yang diteliti • Perbedaan pada komoditas yang diteliti karena setiap komoditas memiliki kesesuaian agroklimat yang berbeda • Peneliti terdahulu menggunakan metode AHP, SWOT IFAS- EFAS untuk menentukan arahan pengembangan agropolitan



Gambar 2.2 Kerangka Teori

